

PEMERIKSAAN MENSTRUASI SECARA PAKSA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

ABSTRAK

Praktik pemeriksaan menstruasi secara paksa yang terjadi di lingkungan pendidikan dengan dalih penegakan kedisiplinan untuk ibadah merupakan fenomena yang meresahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tindakan pemeriksaan menstruasi secara paksa merupakan perbuatan yang melanggar rahasia pribadi dan integritas tubuh siswa perempuan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi hukum pidana dalam pemeriksaan menstruasi secara paksa dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemaksaan menstruasi secara paksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan menstruasi secara paksa dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 huruf a dan c UU TPKS, serta Pasal 4 ayat (2) huruf d UU TPKS jo. Pasal 418 ayat (2) huruf b KUHP. Untuk itu, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sepenuhnya kepada orang perseorangan yaitu guru karena telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Akhirnya, penting untuk Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi mengenai praktik pemeriksaan menstruasi secara paksa ini khususnya di lingkungan Pendidikan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan tegas dan konsisten serta aktif dalam mengedukasi setiap orang agar sadar akan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pemeriksaan Menstruasi, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana

FORCED MENSTRUAL EXAMINATION AS A FORM OF SEXUAL VIOLENCE

ABSTRACT

The practice of forced menstrual examinations occurring in educational settings under the pretext of enforcing discipline for religious observance is a troubling phenomenon. The purpose of this research is to demonstrate that forced menstrual examinations constitute an act that violates personal privacy and the bodily integrity of female students, and can be categorized as a form of sexual violence as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The issue examined is how criminal law constructs the offense of forced menstrual examinations and the criminal liability of perpetrators of such coercion. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that forced menstrual examinations can be constructed as a criminal act of sexual violence regulated under Article 4 paragraph (1) letter b in conjunction with Article 6 letters a and c of the Sexual Violence Crimes Law, as well as Article 4 paragraph (2) letter d of the same Law in conjunction with Article 418 paragraph (2) letter b of the Criminal Code. Accordingly, criminal liability may be fully imposed on individuals, namely teachers, as they meet the elements of capacity for responsibility, intentionality, and the absence of exculpatory grounds. Finally, it is important for the Government to conduct socialization regarding the practice of forced menstrual examinations, particularly within educational environments. In addition, law enforcement officials are expected to act firmly, consistently, and proactively in educating everyone to raise awareness of criminal acts related to sexual violence.

Keyword: *Menstrual Inspection, Sexual Violence, Criminal Liability*